

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan terkait peningkatan suhu bumi saat ini telah muncul sebagai tantangan besar bagi komunitas internasional, di mana emisi karbon memberikan kontribusi penting dalam mempercepat peningkatan temperatur bumi. Seiring bertambahnya perhatian atas isu keberlanjutan, dunia usaha diwajibkan untuk menunjukkan transparansi yang semakin baik ketika mengungkap konsekuensi ekologis dari aktivitas operasionalnya, termasuk melalui pengungkapan emisi gas rumah kaca (Puspita et al., 2024). Keterbukaan ini juga berfungsi sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan, yang membutuhkan informasi akurat untuk menilai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan serta pengelolaan risiko lingkungan. Meski demikian, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa banyak perusahaan masih memiliki tingkat keterbukaan yang rendah dan belum konsisten. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik bisnis perusahaan.

Pengungkapan emisi karbon merupakan upaya perusahaan dalam menyampaikan kepada publik maupun pemangku kepentingan mengenai jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer, strategi yang diterapkan untuk menurunkannya, serta mekanisme pengelolaannya (Saraswati et al., 2021). Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, mendukung agenda global dalam menanggulangi perubahan iklim, serta memperkuat legitimasi di mata masyarakat dan investor

(Pramuditya & Budiasih, 2020). Tren intensitas emisi karbon akibat konsumsi energi di berbagai sektor bisnis pada periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat melalui data berikut:

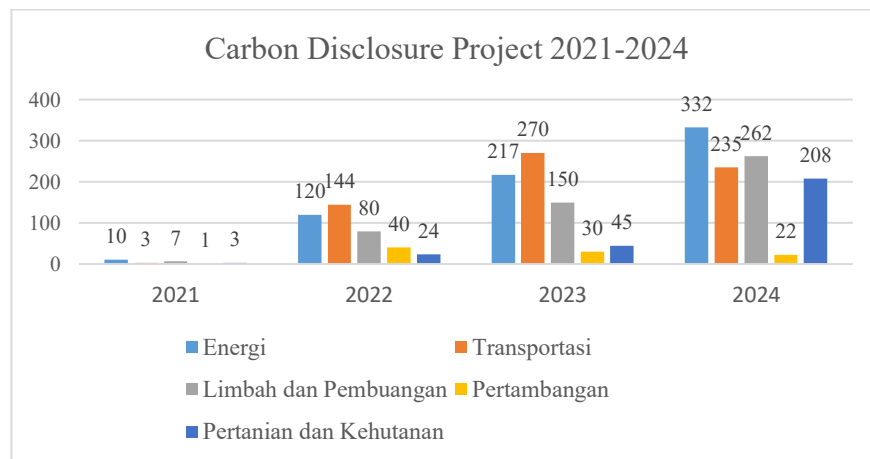
Sektor Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Seluruh Lapangan Usaha</b>	<b>76,5</b>	<b>72,8</b>	<b>72,6</b>	<b>79,7</b>	<b>79,4</b>
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	72,2	71,0	72,5	61,7	69,8
- Pertambangan dan Penggalan	2.467,8	2.577,1	2.639,4	2.426,8	2.211,3
- Industri Pengolahan	116,2	107,3	96,6	143,4	146,6
- Pengadaan Listrik dan Gas	40,2	32,2	32,3	30,6	44,6
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	162,4	153,0	165,7	166,1	147,0
- Transportasi	3.235,7	3.137,9	3.050,1	2.998,8	2.912,5
- Lapangan Usaha Lainnya	5,2	4,0	4,4	4,3	4,4
<b>Rumah Tangga</b>	<b>13,3</b>	<b>13,4</b>	<b>13,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,3</b>

**Gambar 1. 1 Emisi karbon (ton CO<sub>2</sub>e) per miliar rupiah pendapatan**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Selama periode 2020 hingga 2024, sektor usaha di Indonesia mencatat intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) berada pada kisaran 72 hingga 80 juta ton CO<sub>2</sub>e untuk setiap satu miliar rupiah nilai tambah bruto. Intensitas emisi tercatat sebesar 79,4 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2024, angka yang lebih tinggi dibandingkan empat tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi belum diikuti oleh perbaikan efisiensi emisi, bahkan justru mengalami kemunduran. Menurut seluruh sektor, transportasi menempati posisi dengan intensitas tertinggi, yakni mencapai 2.912,5 juta ton CO<sub>2</sub>e per satu miliar rupiah pada 2024, dengan penurunan hanya sekitar 9 persen dibandingkan 2020. Selain itu, sektor pertambangan mencatat intensitas sebesar 2.211,3 juta ton CO<sub>2</sub>e per satu miliar rupiah pada 2024, turun sekitar 10 persen dari tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sejumlah langkah efisiensi dan pengendalian emisi telah dilakukan, tingkat intensitas emisi di sektor-sektor utama relatif tinggi.

Kenaikan emisi pada sektor transportasi dan pertambangan menunjukkan perlunya instrumen evaluasi yang lebih menyeluruh. Salah satu indikator yang banyak dipakai adalah *Carbon Disclosure Score* (CDS) yang tercantum dalam laporan *Emission and Mitigation Carbon Disclosure Project* (CDP). Skor ini membantu pemangku kepentingan menilai sejauh mana perusahaan bersikap transparan serta berkomitmen terhadap isu perubahan iklim global. Data rinci mengenai pengungkapan emisi karbon dari CDP (<https://data.cdp.net,2025>) pada periode 2021-2024 dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Data CDP Indonesia Tahun 2021-2024**

Sumber: Data CDP (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon pada sektor pertambangan menurun sekitar 25 persen pada 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan serupa juga tampak di sektor transportasi, dengan penurunan sekitar 12 persen pada 2024 dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan berkurangnya komitmen perusahaan terhadap transparansi lingkungan. Faktor yang memengaruhi antara lain meningkatnya beban biaya operasional pasca pandemi akibat lonjakan harga

minyak global sebesar US\$18,85 per barel pada 2022-2023 akibat konflik Ukraina-Rusia, serta ketidakpastian kebijakan di Indonesia, khususnya Peraturan Presiden 2021 mengenai Nilai Ekonomi Karbon belum sepenuhnya memberikan insentif keterbukaan.

Penurunan tingkat pelaporan emisi karbon pada sektor pertambangan dan transportasi menunjukkan masih lemahnya komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi terkait lingkungan. Industri pertambangan sendiri dikenal sebagai salah satu penyumbang utama emisi, karena aktivitasnya membutuhkan konsumsi energi yang besar serta menimbulkan dampak ekologis yang luas. Bidang ini mencakup perusahaan yang bergerak dalam pencarian dan pengambilan langsung sumber daya alam, seperti batubara dan logam mineral, yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku industri maupun sumber energi. Mengingat model bisnis yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya dan pemakaian energi berskala besar, bidang tersebut menyumbang peran yang besar dalam mendorong kenaikan pelepasan gas penyebab efek rumah kaca ([www.bps.go.id,2025](http://www.bps.go.id,2025)).

Sektor transportasi termasuk salah satu industri dengan kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, terutama karena tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam kegiatan operasional harian. Industri ini melibatkan berbagai perusahaan orang maupun distribusi barang melalui jalur darat, laut, dan udara. Oleh sebab itu, keterbukaan dalam pelaporan emisi menjadi aspek penting untuk menjamin transparansi lingkungan sekaligus mendorong terciptanya praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Abbas et al., 2023).

Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan di sektor ini masih menitikberatkan pencapaian keuntungan ekonomi, baik dari aktivitas transportasi maupun pertambangan, yang berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan kian menjadi sorotan, terutama setelah penutupan tambang nikel di Raja Ampat pada Juni 2025. Temuan hasil penelusuran dari lembaga pemerintah yang membidangi energi dan sumber daya mineral memperlihatkan bahwa empat perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan konservasi UNESCO tersebut telah menyebabkan deforestasi lebih dari 500 *hektare* serta meningkatkan kadar sedimen di perairan sekitarnya ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id),2025). Laporan pengamat ekonomi energi menyebutkan kerugian negara akibat aktivitas pertambangan di wilayah ini mencapai lebih dari Rp300 triliun ([www.kedaipena.com](http://www.kedaipena.com),2025). Kerugian tersebut tidak hanya berasal dari hilangnya berbagai spesies flora dan fauna langka, tetapi juga dari limbah nikel yang mengandung arsenik dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, sektor transportasi juga kini menjadi perhatian besar karena perannya sebagai kontributor utama emisi gas rumah kaca (Mayapada & Lyu, 2025).

Kenaikan emisi gas rumah kaca banyak dipicu oleh aktivitas logistik perusahaan, khususnya penggunaan truk yang berkontribusi sekitar 35-36% terhadap total emisi CO<sub>2</sub> dari sektor transportasi darat di Indonesia ([www.kompas.com](http://www.kompas.com),2025). Faktor lain yang turut memperburuk kondisi ini adalah praktik pencampuran bahan bakar minyak oleh PT Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com),2025). Situasi

tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan perusahaan transportasi dalam melaporkan emisi karbon, sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperketat regulasi serta mempercepat transisi menuju penggunaan truk listrik dan penerapan standar efisiensi energi dalam konsumsi bahan bakar (Buertey et al., 2020).

Pelaporan jejak karbon dilaksanakan perusahaan sebagai wujud kewajiban terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperlihatkan keselarasan kegiatan operasional mereka dengan tuntutan masyarakat modern yang menekankan kepedulian terhadap isu iklim (Khaq et al., 2022). Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat bencana terkait perubahan iklim pada periode 2020-2024 mencapai Rp115 triliun per tahun (<https://lcdi-indonesia,2021>). Jika dibandingkan secara global, laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi keenam dengan kerugian terbesar akibat dampak perubahan iklim, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Rusia, serta Jepang (Astari et al., 2020).

Alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon tidak selalu dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya keberlanjutan (Wagener, 2023). Studi yang dipaparkan oleh Puspita et al., (2024), mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi emisi karbon memang memperlihatkan tekad perusahaan sehubungan dengan peran lingkungan, meskipun demikian, juga juga dapat menyebabkan konsekuensi negatif berupa meningkatnya beban operasional. Selain itu, masih lemahnya praktik pengungkapan emisi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor,

antara lain manajemen laba, mekanisme tata kelola perusahaan, serta paparan media (Puspita et al., 2024).

Manajemen laba merupakan tindakan ketika pihak pengelola perusahaan secara sengaja mempengaruhi proses penyusunan informasi finansial dengan maksud memenuhi sasaran tertentu atau menampilkan kondisi keuangan sesuai citra yang diinginkan (Oreshile & Adeneye, 2025). Strategi ini kerap digunakan untuk menjaga reputasi perusahaan, terutama saat menghadapi tekanan eksternal terkait isu lingkungan. Hasil penelitian Xi & Xiao, (2022), menunjukkan adanya hubungan negatif antara praktik manajemen laba dengan keterbukaan informasi lingkungan. Namun, temuan tersebut berbeda dari studi Puspita et al., (2024), yang kemudian justru menemukan adanya dampak yang bersifat meningkatkan dari praktik manajemen laba atas pelaporan lingkungan, termasuk emisi karbon.

Selain praktik manajemen laba, faktor lain yang turut berpengaruh besar terhadap keterbukaan emisi karbon adalah mekanisme tata kelola perusahaan (Mardini & Lahyani, 2022). Mekanisme ini berfungsi untuk mengurangi potensi manipulasi manajemen sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap keandalan serta kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Unsur-unsur tata kelola seperti keberadaan dewan independen, keterwakilan gender dalam dewan, ukuran dewan hingga kepemilikan asing berperan penting dalam membangun sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang mampu meminimalkan distorsi informasi (Alqatan & Hichri, 2025).

Independensi dewan dapat diukur melalui beberapa indikator, misalnya proporsi anggota dewan yang tidak memiliki keterikatan pribadi maupun

profesional dengan perusahaan, lamanya masa jabatan yang memungkinkan objektivitas terjaga, serta sejauh mana peran mereka aktif dalam melakukan fungsi pengawasan secara independen tanpa campur tangan manajemen (Park et al., 2023). Studi yang dilakukan oleh Lina & Devyanti, (2024), menunjukkan bahwa dewan independen berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang tunduk pada aturan kolektif, sehingga harus mampu merespons kebutuhan beragam pihak yang berkepentingan, tidak terbatas pada investor pemilik saham. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan dorongan bagi perusahaan untuk membuka informasi emisi karbon secara lebih jelas. Sebaliknya, penelitian Riantono & Sunarto, (2022), menemukan adanya keterkaitan kuat dan bermakna antara independensi dewan terhadap pelaporan informasi emisi karbon, yang menunjukkan bahwa bertambahnya proporsi anggota dewan independen justru cenderung menurunkan tingkat pelaporan emisi perusahaan.

Situasi tersebut terjadi karena dewan independen umumnya lebih menekankan pada efisiensi biaya serta perlindungan kepentingan pemegang saham. Akibatnya, bentuk pelaporan yang dianggap berisiko merusak reputasi atau menambah beban keuangan perusahaan seringkali dihindari. Hasil tersebut konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Hassan & Lahyani, (2020), yang mengungkapkan adanya hubungan negatif antara independensi dewan dan tingkat keterbukaan emisi karbon. Meskipun demikian, temuan yang tidak sejalan disampaikan oleh Amosh & Khatib, (2021), yang selanjutnya menemukan bahwa terdapat indikasi hubungan positif antara independensi dewan dan luasnya pengungkapan emisi karbon.



Keberagaman gender dalam jajaran dewan memiliki peran penting sebagai salah satu elemen utama dalam tata kelola perusahaan. Kehadiran perempuan di posisi dewan menghadirkan sudut pandang yang berbeda sehingga mampu memperkuat kualitas pengambilan keputusan, sekaligus memberikan kontribusi berupa sensitivitas sosial dan kepedulian yang lebih besar terhadap isu lingkungan (Saraswati et al., 2021). Variasi gender dalam komposisi dewan juga membantu memperluas kapasitas kolektif, yang pada akhirnya mendukung penyusunan strategi optimal dalam menangani potensi konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan (Velte, 2024). Temuan ini sejalan dengan hasil studi Furtuna & Sonmez, (2024), yang menunjukkan bahwa keberagaman gender berpengaruh positif terhadap keterbukaan pelaporan emisi karbon. Artinya, perusahaan yang menerapkan inklusivitas gender dalam struktur dewan terbukti lebih responsif terhadap tuntutan *stakeholder* dan memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Meskipun demikian, temuan berbeda dilaporkan oleh Bedi & Singh, (2024c), yang mengindikasikan bahwa keberadaan perempuan di jajaran dewan belum menunjukkan kontribusi berarti terhadap luasnya pengungkapan jejak karbon oleh perusahaan.

Dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak memberikan peluang munculnya beragam sudut pandang dalam memastikan keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan (Pramuditya & Budiasih, 2020). Ukuran dewan berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan lingkungan yang lebih terarah serta akuntabel, sehingga memperkuat komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan, termasuk dalam hal emisi karbon (Toukabri &

Youssef, 2023). Penelitian Bedi & Singh, (2024b), juga mengungkapkan bahwa dewan yang lebih besar mampu menghadirkan keragaman keahlian dan sudut pandang, yang secara positif meningkatkan efektivitas pengelolaan karbon perusahaan. Akan tetapi, hasil tersebut kurang selaras dengan temuan dalam kajian Ezekiel et al., (2024), yang mengungkapkan adanya dampak yang bersifat menurunkan dari ukuran dewan atas tingkat keterbukaan pelaporan emisi karbon. Perusahaan dengan dewan beranggotakan banyak orang dari latar belakang pendidikan yang beragam seringkali kurang fokus mengalokasikan sumber daya untuk program pengurangan emisi, sehingga kualitas pengungkapan emisi dalam laporan tahunan menjadi tidak maksimal.

Kepemilikan dari luar negeri berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas keterbukaan data korporasi serta menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan investasi (Kim et al., 2021). Keterlibatan pemilik modal luar negeri di negara berkembang, juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan melalui mekanisme langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memperkuat praktik governance korporasi (Abbas et al., 2023). Hasil ini konsisten dengan temuan studi Bedi & Singh, (2024a), yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara kepemilikan asing dan tingkat transparansi pelaporan emisi karbon. Dengan demikian, entitas bisnis dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi serta kinerja *ESG* yang baik cenderung lebih transparan dalam menyampaikan data terkait emisi karbon. Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh Singhania & Bhan, (2024), yang mengungkapkan bahwa porsi saham dari luar negeri belum mampu memberikan kontribusi signifikan atas tingkat pelaporan emisi karbon.

Selain kepemilikan asing asing yang berperan dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan, paparan media juga menjadi faktor penting yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Peran media tidak semata-mata menjadi sarana distribusi berita, melainkan turut berfungsi sebagai pihak yang membentuk persepsi masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menekan perusahaan agar memperkuat komitmen lingkungan melalui pelaporan yang lebih terbuka (Boateng et al., 2022). Informasi lingkungan yang disajikan perusahaan tetap diperhitungkan oleh pihak pemberi pinjaman, sehingga media memiliki posisi strategis dalam memengaruhi penyebaran isu-isu terkait lingkungan. Publikasi media mengenai kasus pencemaran dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, seperti menurunnya minat kreditor untuk memberikan pinjaman atau meningkatnya suku bunga (Syafik et al., 2025). Sejalan dengan itu, Octavio & Setiawan, (2025), menemukan bahwa kian intens sorotan media pada permasalahan lingkungan, kian kuat pula dorongan pada korporasi guna melaporkan aktivitas mereka yang berhubungan langsung dengan dampak iklim dan langkah-langkah pengurangan emisi karbon.

Penelitian ini berusaha menutup celah dalam literatur maupun praktik dengan menggunakan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan sebagai dasar konseptual, berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengandalkan teori keagenan. Pemilihan periode penelitian 2021-2024 memungkinkan analisis yang lebih mutakhir serta sesuai dengan dinamika terkini, sehingga hasilnya diharapkan dapat merefleksikan kondisi terbaru. Fokus kajian diarahkan terhadap dokumen tahunan korporasi yang meliputi penyajian informasi keuangan, beserta

laporan keberlanjutan yang memuat penjelasan mengenai emisi karbon pada perusahaan-perusahaan pertambangan dan transportasi yang masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Hal ini memberikan sudut pandang baru mengingat masih sedikit penelitian yang menelaah keterkaitan antara praktik manajemen laba, mekanisme tata kelola, dan paparan media dengan tingkat keterbukaan emisi karbon di sektor tersebut.

Selain itu, dengan mempertimbangkan fenomena terkait upaya peningkatan keterbukaan mengenai emisi karbon, munculnya ketidaksamaan temuan dari berbagai studi terdahulu, serta adanya celah riset (*research gap*) yang membedakan studi ini dari kajian terdahulu, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Pengaruh Praktik Manajemen Laba, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Paparan Media Terhadap Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah praktik manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Apakah keberagaman gender dalam dewan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
4. Apakah independensi dewan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
6. Apakah paparan media berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh praktik manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keberagaman gender dalam dewan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi dewan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh paparan media terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil riset ini ditujukan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai rujukan dalam bidang akuntansi lingkungan, khususnya terkait praktik pengungkapan emisi karbon.
- b. Hasil riset ini ditujukan mampu menambah wawasan tentang pengaruh praktik manajemen laba, penerapan tata kelola perusahaan, serta paparan media terhadap keterbukaan informasi perusahaan pada sektor pertambangan dan transportasi.

- c. Hasil riset ini ditujukan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas kajian serupa pada industri lain dengan tingkat emisi yang relatif tinggi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil riset ini ditujukan dapat memberikan wawasan kepada perusahaan di sektor pertambangan dan transportasi mengenai urgensi pelaporan emisi karbon sebagai wujud tanggung jawab sosial.
- b. Hasil riset ini ditujukan dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam menilai praktik manajemen laba, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*), serta pengelolaan paparan media guna meningkatkan transparansi.
- c. Hasil riset ini ditujukan dapat berkontribusi dalam memperkuat reputasi perusahaan melalui keterbukaan dalam penyampaian informasi terkait lingkungan.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Regulator**

- a. Hasil riset ini ditujukan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga pengawas seperti OJK, BEI, maupun Kementerian ESDM dalam merancang kebijakan yang mendorong peningkatan transparansi pelaporan emisi karbon.
- b. Hasil riset ini ditujukan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi maupun pemberian insentif yang mampu mendorong penerapan praktik bisnis berkelanjutan pada sektor dengan tingkat emisi tinggi.

- c. Hasil riset ini ditujukan dapat mendukung implementasi kebijakan pengawasan atas pelaporan lingkungan agar lebih sistematis dan terukur.